

**KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI KONFLIK SOSIAL
DI KAWASAN IBU KOTA NEGARA KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Muhammad Arrafi Rizaqul Fahmi

NPP. 32.1024

*Asal Pendaftara Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: mrfrafi6@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nadya Anggara Putri, SE., M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The relocation of Indonesia's capital city (IKN) to Sepaku District, Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan, has brought significant social impacts, particularly the potential for social conflict due to migration dynamics and spatial transformation. The influx of migrants from various regions with diverse cultural and economic backgrounds presents new challenges for local communities, such as cultural clashes, land disputes, and unequal access to resources. Purpose:* This study aims to identify the causes of social conflict, examine the preparedness of communities, local governments, and social groups in facing such conflicts, and analyze the efforts made to prevent and manage them within the IKN area. **Method:** *Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews with key informants and document analysis. Result:* The findings reveal varying levels of preparedness across different stakeholders, with key challenges including limited social integration and uneven mitigation policies. **Conclusion:** *Strengthening preparedness programs through active engagement of community leaders, multicultural education, and inclusive development policies is essential to ensure social conflicts do not hinder the capital city's development process.*

Keywords: *preparedness, social conflict, capital city, local community, migration, Sepaku*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membawa dampak sosial yang signifikan, terutama potensi konflik sosial akibat dinamika migrasi dan perubahan tata ruang. Kehadiran pendatang dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya dan kepentingan berbeda memicu tantangan baru bagi masyarakat lokal, seperti benturan budaya, sengketa lahan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Tujuan:* Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik sosial, mengkaji kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah daerah, dan komunitas dalam menghadapi

konflik, serta menganalisis upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani konflik di kawasan IKN. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai informan kunci dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masih bervariasi antar kelompok, dengan tantangan utama berupa minimnya integrasi sosial dan belum meratanya kebijakan mitigasi konflik. **Kesimpulan:** Diperlukan penguatan program kesiapsiagaan melalui pelibatan aktif tokoh masyarakat, edukasi multikulturalisme, dan kebijakan pembangunan yang inklusif agar konflik sosial tidak menghambat proses pembangunan IKN.

Kata Kunci: kesiapsiagaan, konflik sosial, Ibu Kota Negara, masyarakat lokal, migrasi, Sepaku

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, didorong oleh berbagai pertimbangan strategis yang telah lama menjadi perhatian pemerintah. Jakarta, yang telah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia selama lebih dari 60 tahun sejak ditetapkan Perpres Nomor 2 Tahun 1961, menghadapi beragam tantangan berat akibat urbanisasi yang tidak terkendali, beban infrastruktur yang berlebihan, serta masalah lingkungan yang semakin parah. Populasi Jakarta yang sangat padat, Infrastruktur kota yang terbatas tidak mampu lagi menampung arus manusia dan kendaraan yang terus meningkat, mengakibatkan kemacetan dan polusi udara yang parah, masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi, rentan terhadap bencana alam, terutama banjir dan penurunan tanah yang terjadi hampir setiap tahun (Fernando, 2023).

Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi baru IKN karena memiliki keunggulan geografis yang lebih aman dari bencana alam (Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, 2022a), terutama gempa bumi dan banjir, serta memiliki posisi yang strategis di tengah wilayah Indonesia. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diharapkan membawa dampak positif dalam pemerataan pembangunan dan perekonomian di luar Pulau Jawa. Selama ini, perekonomian Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto (PDB) nasional. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan antar daerah di Indonesia. Dengan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, pemerintah berharap dapat mendorong pembangunan di luar Jawa, sehingga terjadi pemerataan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia (Khair et al., 2023).

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, meskipun membawa banyak dampak positif, juga memiliki potensi dampak negatif, terutama dalam hal sosial budaya yang dapat memicu konflik sosial (Valentina et al.). Kehadiran berbagai kelompok baru di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya menghadirkan tantangan besar bagi masyarakat lokal, yang sebelumnya hidup dalam struktur sosial yang relatif homogen dan stabil. Dengan meningkatnya arus migrasi dari berbagai daerah di Indonesia, terjadi benturan budaya yang tak terhindarkan karena setiap kelompok membawa

adat istiadat, bahasa, kebiasaan, serta nilai-nilai yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini dapat memicu ketegangan sosial, terutama jika tidak disertai dengan kesiapan masyarakat setempat dan kebijakan integrasi sosial yang efektif (Konflik Sosial di DKI Jakarta et al., 2022).

Kehadiran masyarakat dari luar Kalimantan Timur yang datang dengan berbagai latar belakang, kepentingan, dan tujuan, baik untuk bekerja, berinvestasi, maupun mencari peluang baru di wilayah IKN, dapat menjadi pemicu terjadinya gesekan dan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan budaya, adat istiadat, serta cara pandang antara pendatang dan masyarakat lokal dapat menciptakan potensi ketegangan, terutama jika tidak ada upaya nyata untuk membangun integrasi sosial yang harmonis. Tanpa kebijakan yang inklusif dan strategi mitigasi yang efektif, perbedaan ini dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas, mengganggu stabilitas sosial, dan berpotensi menghambat keberhasilan pembangunan IKN secara keseluruhan (Ratib, 2022).

Selain itu, persaingan sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi konflik. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Kalimantan Timur sebelumnya menjadi lahan bagi masyarakat lokal untuk mengakses sumber daya seperti lahan untuk bertani dan hutan untuk berburu atau mencari kayu. Namun, dengan adanya pembangunan IKN, sebagian besar lahan di Kecamatan Sepaku kini beralih fungsi menjadi area konstruksi dan kawasan permukiman baru. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa lebih dari 40% lahan di Kecamatan Sepaku telah diambil alih untuk proyek IKN, mengurangi akses masyarakat lokal terhadap lahan yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian mereka. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan akibat perubahan tata guna lahan. Selain itu, masalah akses air bersih dan fasilitas umum lainnya juga dapat menjadi sumber ketegangan, terutama jika kebutuhan dasar ini lebih dahulu terpenuhi untuk pendatang dan proyek-proyek besar, sementara masyarakat lokal masih mengalami keterbatasan dalam akses infrastruktur dasar (Sutanto, 2022).

Dampak dari potensi konflik sosial ini dapat sangat merugikan jika tidak ditangani dengan baik. Dalam jangka panjang, konflik sosial dapat menghambat proses pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan baru. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengelola keberagaman ini secara efektif. Langkah-langkah mitigasi seperti pelatihan integrasi sosial, program penguatan identitas budaya lokal, dan dialog antar komunitas dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok. Selain itu, kebijakan pemerataan akses terhadap sumber daya dan pekerjaan juga sangat diperlukan agar masyarakat lokal dapat merasakan manfaat dari pembangunan IKN tanpa merasa terpinggirkan (Purnomo & Demartoto, 2023).

Pemerintah daerah secara konsisten menekankan pentingnya memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi landasan harmoni sosial di masyarakat, terutama di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam upaya tersebut, peran pemuda dan tokoh masyarakat dianggap sangat krusial sebagai agen perubahan yang dapat menjembatani perbedaan, memperkuat solidaritas antar komunitas, dan mencegah munculnya konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga menggarisbawahi perlunya penguatan peran tokoh adat dan komunitas lokal dalam menangkal radikalisme, yang sering kali memanfaatkan kondisi sosial yang tidak stabil untuk menyebarkan pengaruh negatif. Dengan kolaborasi aktif antara pemerintah, pemuda, dan tokoh masyarakat, diharapkan proses pembangunan IKN dapat berjalan

selaras dengan pelestarian budaya lokal dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif (Saputra et al., 2023).

Sejak dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut tingkat konflik sosial di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dari 2019 hingga 2023. Jumlah kasus konflik sosial meningkat drastis dari hanya 5-6 kasus pada tahun 2019 menjadi lebih dari 18 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah kasus di 20 kasus. Lonjakan ini terjadi saat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di daerah tersebut dimulai, yang mengakibatkan pergeseran besar dalam dinamika sosial dan ekonomi. Jumlah konflik yang meningkat ini menunjukkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat lokal, terutama terkait dengan masalah seperti sengketa lahan, konflik budaya antara penduduk lokal dan pendatang, dan ketimpangan dalam akses ke sumber daya dan kesempatan kerja (Heriyanti, 2022).

Dari data ini, rencana kesiapsiagaan yang komprehensif harus dibuat untuk mencegah dan mengelola konflik sosial di wilayah ini. Jumlah konflik yang meningkat menunjukkan betapa pentingnya membuat kebijakan yang inklusif, memperkuat komunikasi antar komunitas, dan mendorong dialog sosial yang efektif untuk mewujudkan lingkungan yang harmonis di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung. Untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan dan diterima oleh semua pihak, konflik sosial dapat dihindari dengan menggunakan pendekatan kesiapsiagaan yang tepat (Sintaresmi et al., 2022).

Namun, dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kalimantan Timur memiliki tingkat konflik massal yang lebih tinggi. Jenis konflik yang terjadi di wilayah ini meliputi perkelahian antar kelompok warga, konflik antar departemen, serta perselisihan antar individu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasional tingkat konflik di Kalimantan Timur tergolong rendah, dinamika sosial di wilayah ini tetap memerlukan perhatian khusus, terutama mengingat kompleksitas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dapat memicu potensi konflik sosial baru (Marwanti, 2018).

Banyaknya Kasus konflik sosial di Kecamatan Sepaku mengakibatkan urgensi kesiapsiagaan di Kecamatan Sepaku semakin tinggi, mengingat cepatnya perubahan sosial di kawasan tersebut. Masyarakat lokal, pemerintah daerah dan komunitas masyarakat perlu dipersiapkan dengan pengetahuan dan keterampilan serta regulasi dan kebijakan untuk menghadapi berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi akibat adanya perpaduan budaya, perbedaan kepentingan ekonomi, serta perubahan tata ruang wilayah. Program kesiapsiagaan yang melibatkan pelatihan, dialog antarkelompok, dan penguatan identitas budaya lokal lewat komunitas masyarakat, serta penerapan kebijakan dan regulasi yang tepat bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Melalui kesiapsiagaan, diharapkan masyarakat di Kecamatan Sepaku tidak hanya mampu menghadapi konflik secara proaktif, tetapi juga bisa membangun lingkungan yang inklusif dan damai, meskipun dalam situasi sosial yang berubah drastis.

Dari permasalahan diatas, maka penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI KONFLIK SOSIAL DI KAWASAN IBU KOTA NEGARA KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA”** yang dimana penelitian ini dibatasi dengan hanya meneliti kesiapsiagaan terhadap konflik sosial di daerah Kecamatan Sepaku.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan kebijakan strategis nasional yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul berbagai persoalan sosial yang kompleks, terutama terkait dengan potensi konflik sosial akibat perubahan demografis, budaya, serta pengalihan fungsi lahan.

Berbagai kajian dan laporan sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek fisik pembangunan IKN, seperti infrastruktur, tata ruang, dan dampak lingkungan. Sementara itu, kajian yang secara khusus mendalami kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi konflik sosial akibat pemindahan IKN masih sangat terbatas, padahal aspek ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas sosial di kawasan baru yang sarat dengan dinamika baru. Data empiris menunjukkan peningkatan jumlah konflik sosial yang signifikan di Kecamatan Sepaku sejak dimulainya pembangunan IKN, namun belum banyak penelitian yang fokus pada upaya antisipasi, mitigasi, serta kesiapsiagaan sosial terhadap konflik-konflik tersebut.

Lebih lanjut, meskipun pemerintah daerah telah berupaya memelihara nilai-nilai kearifan lokal dan melibatkan tokoh masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, efektivitas dari langkah-langkah tersebut belum dikaji secara mendalam. Demikian pula, belum ada pemetaan yang komprehensif mengenai sejauh mana kesiapsiagaan masing-masing kelompok masyarakat, termasuk peran pemuda, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam mencegah eskalasi konflik.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting dalam mengisi kekosongan kajian akademik mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi konflik sosial di wilayah strategis seperti Kecamatan Sepaku, khususnya dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya wacana ilmiah, tetapi juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola keberagaman dan mencegah konflik di masa transisi pembangunan IKN.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menelaah dinamika sosial yang muncul akibat pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan penting yang memperlihatkan berbagai perspektif mengenai potensi konflik, kesiapan masyarakat, serta transformasi sosial yang terjadi di wilayah terdampak. Namun demikian, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mengembangkan studi lebih lanjut, khususnya dalam konteks kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi konflik sosial secara langsung di kawasan inti IKN, yaitu Kecamatan Sepaku.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, 2022a) berjudul “Pencegahan Potensi Konflik Sosial di Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Nasional” berfokus pada potensi konflik sosial yang mungkin terjadi di IKN. Penelitian ini menyoroti berbagai faktor pemicu konflik, seperti ketimpangan sosial, eksklusivitas terhadap masyarakat lokal, dan benturan budaya antara pendatang dan penduduk asli. Meskipun pembahasannya relevan dengan isu sosial di kawasan IKN, fokus utama penelitian ini adalah pada identifikasi potensi konflik dan pencegahannya secara umum, bukan pada kesiapsiagaan aktor-aktor lokal dalam menghadapi

konflik yang telah nyata terjadi. Penelitian ini bersifat konseptual dan belum menyentuh aspek teknis kesiapan komunitas dan pemerintah daerah dalam merespons konflik yang meningkat.

Sementara itu, (Saputra et al., 2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Kerentanan Konflik Sosial di Kawasan Ibu Kota Negara” menganalisis kerentanan sosial akibat perubahan struktur masyarakat, terutama terkait dengan faktor migrasi dan transformasi ekonomi. Penelitian ini menggambarkan secara rinci bagaimana struktur sosial yang homogen berubah menjadi heterogen karena arus pendatang. Meski demikian, fokus Saputra lebih pada kerentanan atau potensi rawan konflik, bukan pada respons, kesiapan, dan sistem mitigasi yang dikembangkan oleh masyarakat atau pemerintah daerah dalam menghadapi konflik yang sudah muncul. Ini membedakan penelitian Saputra dari penelitian ini yang secara eksplisit mengkaji upaya kesiapsiagaan terhadap konflik sosial yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Kecamatan Sepaku.

Penelitian oleh (Purnomo & Demartoto, 2023) dengan judul “Tingkat Kesiapan Masyarakat di Kawasan Penyangga Ibu Kota Negara (Studi Kasus: Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur)” meneliti bagaimana kesiapan masyarakat di wilayah penyangga menghadapi perubahan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan IKN. Meskipun ada kemiripan dalam hal pembahasan kesiapan masyarakat, penelitian ini berlokasi di luar kawasan inti IKN, yaitu di Balikpapan sebagai kota penyangga. Fokusnya juga lebih pada aspek ekonomi dan kesiapan infrastruktur sosial, bukan pada dinamika konflik yang muncul akibat perbedaan budaya dan kompetisi sumber daya seperti yang terjadi di Kecamatan Sepaku. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang kesiapan daerah sekitar, namun belum menelusuri kesiapan masyarakat yang secara langsung terdampak pembangunan di pusat IKN.

Selanjutnya, (Sutanto, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara” menjelaskan bagaimana perpindahan IKN memicu perubahan besar dalam struktur sosial dan budaya masyarakat lokal. Fokus penelitian ini adalah pada proses transformasi sosial dan adaptasi budaya masyarakat lokal terhadap perubahan tata ruang dan interaksi sosial. Walaupun memiliki relevansi tinggi dengan aspek sosiologis, penelitian ini tidak mengkaji secara langsung mekanisme kesiapsiagaan terhadap konflik, melainkan lebih pada aspek perubahan kultural dan nilai-nilai masyarakat.

Terakhir, penelitian oleh (Ratib, 2022) dengan judul “Kesiapan Dayak Deah di Desa Kinarum dalam Menyambut Ibu Kota Negara Baru” mengkaji kesiapan kelompok etnis tertentu di wilayah sekitar IKN. Penelitian ini sangat penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana komunitas adat lokal mempersiapkan diri terhadap perubahan sosial yang ditimbulkan oleh proyek IKN. Akan tetapi, cakupan wilayah penelitiannya berada di luar Kecamatan Sepaku, dan fokusnya lebih pada kesiapan dalam arti penerimaan terhadap pembangunan, bukan kesiapsiagaan dalam menghadapi konflik sosial secara langsung.

Berdasarkan lima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada studi yang secara spesifik dan komprehensif menelaah kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah di kawasan inti IKN, yakni Kecamatan Sepaku, dalam merespons dan mengelola konflik sosial yang telah terjadi secara nyata dan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan kontribusi praktis dan akademik terkait model kesiapsiagaan yang tepat dan berbasis pada kondisi lokal yang kompleks dan dinamis.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji isu-isu sosial seputar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Widhianto (2023) dan Saputra (2022), lebih memfokuskan pada potensi konflik sosial atau kerentanan masyarakat akibat perpindahan ibu kota, tanpa mengkaji secara mendalam kesiapsiagaan yang bersifat preventif dan strategis dalam menghadapi konflik yang nyata terjadi. Penelitian oleh Aditya Iskandar (2023) memang menyinggung tentang kesiapan masyarakat, namun dilakukan di wilayah penyangga seperti Kota Balikpapan, bukan di wilayah inti pembangunan IKN. Sementara itu, studi Sutanto (2022) dan Ripaldi et al. (2022) lebih menitikberatkan pada transformasi budaya dan kesiapan umum kelompok lokal tanpa secara eksplisit membahas mekanisme atau sistem kesiapsiagaan konflik yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, penelitian praja ini menawarkan kebaruan dengan mengambil lokasi langsung di kawasan inti IKN, yakni Kecamatan Sepaku, dan memfokuskan pada bentuk-bentuk kesiapsiagaan masyarakat serta pemerintah daerah dalam merespons konflik sosial yang telah muncul dan berkembang akibat pembangunan besar-besaran. Penelitian ini tidak hanya memotret potensi atau kerentanan, melainkan juga menganalisis langkah-langkah konkret, kapasitas institusional, serta dinamika sosial yang memengaruhi kemampuan lokal dalam mengelola konflik secara aktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang lebih aplikatif dan kontekstual dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi rujukan penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi mitigasi konflik sosial di kawasan IKN.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di kawasan Ibu Kota Nusantara, khususnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah daerah, dan komunitas sosial dalam menghadapi dinamika konflik sosial yang muncul sebagai dampak dari pembangunan Ibu Kota Negara. Selain itu, penelitian ini ingin mengidentifikasi berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam merespons dan mengelola konflik sosial di tengah proses pembangunan, guna menciptakan kondisi sosial yang lebih harmonis dan kondusif di wilayah IKN.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-induktif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggambarkan serta menganalisis kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi konflik sosial di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Menurut (Dewi et al., 2020), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif digunakan karena bertujuan memahami gejala sentral secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Amin, 2017) menekankan bahwa metode kualitatif sangat efektif untuk memahami peristiwa sosial dari perspektif partisipan penelitian.

Selaras dengan pendapat tersebut, Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menekankan pada proses dan makna, bukan sekadar hasil. Oleh karena itu, peneliti menjadi instrumen utama yang mengumpulkan, menafsirkan, dan menyimpulkan data berdasarkan fakta lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori relevan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-induktif. Metode deskriptif bertujuan memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fakta di lapangan, sementara metode induktif dimulai dari pengamatan terhadap fenomena khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. (Syamsuddin, 2020) menyatakan bahwa pendekatan induktif memungkinkan peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam praktik nyata. Dengan demikian, peneliti akan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan warga setempat, serta dari dokumen dan arsip tertulis sebagai data sekunder. Informan dipilih menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Informan utama terdiri dari pejabat daerah seperti Kepala Deputy Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan, Camat Sepaku, kepala desa dan lurah setempat, serta tokoh masyarakat dan warga Kecamatan Sepaku (Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, 2022b).

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri, dibantu alat perekam, kamera, dan buku catatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih fleksibel dan mendalam, serta dokumentasi untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara. Peneliti tidak menggunakan observasi karena kemungkinan tidak ditemukannya konflik sosial secara langsung selama penelitian berlangsung, namun tetap memperhatikan dinamika sosial di lapangan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk menyaring data yang relevan, penyajian dilakukan dalam bentuk narasi, gambar, dan tabel, serta kesimpulan disusun secara sistematis berdasarkan data yang telah dianalisis.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai kesiapsiagaan berbagai pihak dalam menghadapi potensi konflik sosial di kawasan strategis nasional yang sedang mengalami transformasi besar sebagai Ibu Kota Negara baru Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dari tanggal 06 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025. Fokus penelitian adalah menganalisis tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi konflik sosial akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah tersebut. Untuk mengkaji hal ini, peneliti menggunakan teori kesiapsiagaan dari Jan Sopaheluwakan, et al, yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu: Individu, Pemerintah Daerah, dan Komunitas Masyarakat. Ketiga dimensi tersebut dianalisis berdasarkan sembilan indikator: pengetahuan & sikap individu, kesadaran, keterampilan, kebijakan, regulasi, mobilisasi sumber daya, panduan, pengetahuan & sikap komunitas, dan koordinasi.

3.1. Penyebab Konflik Sosial

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, merupakan kebijakan strategis berskala nasional yang memiliki dampak sosial yang luas. Meskipun membawa harapan akan kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, proses ini juga menyisakan sejumlah potensi konflik sosial yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, peneliti mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab konflik sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu faktor utama adalah persoalan pengadaan lahan dan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat. Banyak warga lokal merasa bahwa proses pengadaan lahan dilakukan tanpa keterbukaan dan melibatkan mereka secara layak. Nilai ganti rugi yang ditawarkan pun seringkali dianggap tidak sepadan dengan nilai historis dan ekonomi dari tanah yang mereka miliki secara turun-temurun. Ketidakpuasan ini menciptakan rasa ketidakadilan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun pengembang proyek IKN.

Selain itu, perbedaan persepsi dan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan investor juga menjadi pemicu potensi konflik. Sebagian masyarakat lokal melihat pembangunan IKN sebagai peluang besar yang dapat meningkatkan taraf hidup dan membuka akses terhadap fasilitas umum. Namun, tidak sedikit pula yang mencemaskan dampak negatif dari pembangunan ini, seperti hilangnya identitas budaya lokal, kerusakan lingkungan, serta potensi marginalisasi kelompok masyarakat adat. Perbedaan pandangan ini diperparah dengan tidak adanya ruang dialog yang efektif, sehingga memunculkan ketegangan horizontal di tengah masyarakat. Situasi ini kian kompleks dengan adanya proyeksi besar-besaran migrasi penduduk dari berbagai daerah ke kawasan IKN. Kehadiran pendatang dengan latar belakang budaya, bahasa, dan kebiasaan yang beragam bisa menjadi tantangan besar bagi harmoni sosial. Tanpa adanya penyesuaian dan edukasi sosial yang memadai, perbedaan ini bisa menjadi bibit konflik antar kelompok. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan dan mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga berpotensi memperuncing ketegangan antara warga lokal dan pendatang.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang mulai terlihat sejak tahap awal pembangunan IKN. Masyarakat yang memiliki akses dan koneksi dengan proyek pembangunan cenderung mendapatkan manfaat lebih cepat dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang kurang berdaya. Ketimpangan ini dapat menciptakan kecemburuan sosial dan memperkuat rasa terpinggirkan di kalangan warga yang tidak ikut merasakan langsung manfaat pembangunan. Apabila ketimpangan ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul gerakan sosial yang menuntut keadilan, yang pada gilirannya dapat berubah menjadi konflik terbuka. Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan awal terhadap potensi konflik ini menjadi sangat penting agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat merancang strategi mitigasi konflik yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan.

3.2 Kesiapsiagaan Menghadapi Konflik Sosial

Untuk menghadapi berbagai potensi konflik sosial yang telah dipetakan sebelumnya, kesiapsiagaan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Sepaku sebagai lokasi strategis Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Kesiapsiagaan ini perlu dianalisis secara komprehensif melalui tiga dimensi utama, yakni kesiapsiagaan individu, kesiapsiagaan pemerintah daerah, dan kesiapsiagaan komunitas masyarakat. Ketiga dimensi ini saling

terkait dan membentuk kerangka sosial yang menentukan kemampuan kolektif dalam mencegah, merespons, dan mengelola konflik sosial secara damai.

Pada dimensi individu, terlihat bahwa masyarakat Kecamatan Sepaku menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap terhadap isu-isu sosial sejak dimulainya pembangunan IKN. Sebelum proyek ini bergulir, mayoritas warga belum pernah mengalami perubahan sosial yang masif. Namun kini, kesadaran akan pentingnya informasi dan pengetahuan tentang dampak pembangunan mulai tumbuh. Sebagian warga secara aktif mencari informasi melalui media sosial, menghadiri sosialisasi, dan berdiskusi di komunitas lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya semangat adaptasi, meskipun masih terbatas pada kelompok usia produktif dan berpendidikan menengah ke atas. Di sisi lain, masih terdapat ketimpangan signifikan dalam distribusi pengetahuan, terutama pada kelompok lansia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Mereka cenderung pasif dan belum memahami secara utuh dampak sosial jangka panjang dari pembangunan IKN. Situasi ini mengindikasikan pentingnya program edukasi yang sistematis, berjenjang, dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Kesadaran masyarakat juga beragam, sebagaimana diungkap dalam wawancara dengan seorang guru lokal bernama Ibu Alful. Beliau menyoroti bahwa anak-anak lokal masih mengalami ketimpangan dalam hal kualitas pendidikan dibandingkan dengan standar nasional. Hal ini mempengaruhi kesiapan generasi muda dalam menghadapi perubahan sosial yang kompleks. Di kalangan dewasa, kesadaran masyarakat cenderung bersifat pragmatis, lebih terfokus pada peluang ekonomi jangka pendek seperti pekerjaan konstruksi dan perdagangan. Sementara itu, potensi ancaman jangka panjang seperti ketimpangan sosial, marginalisasi budaya lokal, dan konflik antarkelompok masih kurang mendapat perhatian. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran harus dilakukan melalui pendekatan kultural yang inklusif, menggabungkan nilai-nilai lokal dan komunikasi lintas generasi.

Keterampilan masyarakat dalam menghadapi konflik sosial juga menjadi sorotan penting. Meskipun memiliki keterampilan tradisional yang kuat, seperti bercocok tanam dan kerajinan tangan, masyarakat Sepaku umumnya belum memiliki kemampuan khusus dalam hal manajemen konflik, mediasi, atau komunikasi antarbudaya. Padahal, dalam konteks multikultural yang akan berkembang seiring dengan migrasi penduduk ke kawasan IKN, keterampilan sosial ini sangat dibutuhkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa belum banyak pelatihan formal yang diselenggarakan untuk mengasah keterampilan ini. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan lembaga pendidikan, LSM, dan organisasi keagamaan untuk menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada resolusi konflik, komunikasi inklusif, serta pendidikan lintas budaya secara massif dan berkelanjutan.

Pada dimensi kedua, yaitu kesiapsiagaan pemerintah daerah, tampak bahwa upaya kebijakan masih belum optimal dalam mengantisipasi konflik sosial. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pendukung pembangunan IKN, tetapi belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur strategi pencegahan konflik sosial. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang ada masih bersifat umum dan belum menyentuh isu-isu strategis seperti pengelolaan keberagaman, perlindungan hak masyarakat adat, atau penyelesaian konflik berbasis hukum adat. Diperlukan adanya kebijakan afirmatif yang dapat menjamin partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan serta memastikan keadilan sosial terwujud secara nyata.

Dari sisi regulasi, belum tersedia aturan yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian konflik berbasis masyarakat. Ketidakhadiran instrumen hukum yang mendukung masyarakat untuk menyalurkan aspirasi atau menyelesaikan sengketa secara adil menjadi salah satu pemicu potensi ketegangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang regulasi baru yang berpihak pada keadilan distributif dan prosedural. Hal ini juga harus disertai dengan penyusunan panduan teknis atau standard operating procedure (SOP) yang spesifik dalam mitigasi konflik sosial. Minimnya SOP saat ini menyebabkan respons pemerintah sering bersifat reaktif dan tidak terkoordinasi. Sebuah panduan yang jelas dan teknis diperlukan untuk mengatur pembagian peran antarinstansi, langkah-langkah preventif yang bisa diambil, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Mobilisasi sumber daya oleh pemerintah daerah juga masih sangat terbatas. Pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi sumber daya manusia lokal, seperti pemuda dan tokoh masyarakat, dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi publik. Selain itu, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kecamatan belum pernah mendapatkan pelatihan tentang manajemen konflik atau komunikasi publik yang efektif. Padahal, kemampuan ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Pelatihan khusus bagi ASN serta kerja sama strategis dengan media lokal, LSM, dan komunitas agama menjadi langkah penting yang harus segera diambil guna memperkuat kesiapsiagaan secara kelembagaan.

Dimensi terakhir adalah kesiapsiagaan komunitas masyarakat. Komunitas lokal, baik berbasis adat, agama, maupun kepemudaan, merupakan fondasi sosial yang paling kuat dalam menjaga kohesi dan stabilitas sosial. Di Kecamatan Sepaku, komunitas-komunitas ini memiliki pengaruh yang besar terhadap cara masyarakat merespons perubahan sosial. Beberapa komunitas telah menunjukkan sikap proaktif, seperti menyelenggarakan dialog antarkelompok, kegiatan sosial lintas budaya, dan kerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun demikian, belum semua komunitas memiliki informasi dan kesadaran yang memadai mengenai potensi konflik sosial di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan publik berbasis komunitas harus menjadi program utama dalam membangun kesadaran kolektif dan menciptakan sikap inklusif di tengah masyarakat yang majemuk.

Koordinasi antar komunitas juga masih belum terfasilitasi dengan baik. Saat ini, interaksi antar kelompok masyarakat cenderung terjadi secara informal dan sporadis. Ketidadaan forum koordinasi resmi menyebabkan potensi miskomunikasi dan prasangka antar kelompok menjadi lebih besar. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar komunitas secara rutin dan berkelanjutan. Forum semacam ini bisa menjadi wadah untuk membahas isu-isu sensitif, menyampaikan aspirasi, serta membangun sistem peringatan dini berbasis komunitas. Dengan membangun sistem ini, potensi konflik dapat dideteksi sejak dini dan ditangani secara damai sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Secara keseluruhan, kesiapsiagaan dalam menghadapi konflik sosial di Kecamatan Sepaku masih berada pada tahap awal yang perlu diperkuat di semua lini. Masyarakat individu harus dibekali dengan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang memadai; pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan, regulasi, dan panduan yang operasional; sementara komunitas masyarakat harus diberdayakan dan difasilitasi untuk menjadi agen perdamaian yang aktif. Ketiga dimensi ini harus terintegrasi dalam sebuah strategi besar yang menjadikan pembangunan IKN tidak hanya sebagai

proyek fisik semata, melainkan sebagai proyek sosial yang menciptakan keadilan, harmoni, dan keberlanjutan.

3.3 Upaya Yang Telah Dilakukan

Menghadapi potensi konflik sosial di Kecamatan Sepaku membutuhkan sinergi dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat Individu, dan Komunitas Masyarakat. Ketiga elemen ini harus bekerja sama membangun komunikasi terbuka, meningkatkan kapasitas masyarakat, mempromosikan toleransi, serta memperkuat sistem keamanan dan penegakan hukum. Pemantauan dan evaluasi program secara berkala juga penting agar penanganan konflik dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan upaya yang komprehensif, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan lancar dan tercipta masyarakat yang harmonis serta sejahtera.

Dalam aspek Masyarakat Individu, hasil wawancara menunjukkan beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain pemahaman lintas budaya. Sebagai masyarakat yang semakin beragam, penting untuk menghargai perbedaan nilai dan kebiasaan. Sekolah menjadi miniatur masyarakat tempat menanamkan nilai-nilai tersebut. Selain itu, kemampuan menjalin hubungan baik dengan semua pihak sangat ditekankan, termasuk literasi informasi yang kritis untuk mencegah penyebaran hoaks atau disinformasi yang dapat memicu konflik. Upaya lainnya meliputi peningkatan toleransi dan kerukunan antar kelompok, menjalin hubungan harmonis dengan pendatang, memilah informasi yang diterima, serta mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kerukunan dan pemahaman lintas budaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berperan penting dalam mencegah konflik melalui program-program strategis. Salah satu program unggulan adalah 'Harmoni Sepaku' yang melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam dialog rutin bulanan guna mempromosikan toleransi dan menjaga eksistensi budaya lokal di tengah pembangunan IKN. Selain itu, pemerintah meningkatkan kapasitas aparat keamanan dan penegak hukum, membangun partisipasi masyarakat, serta membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan konflik sosial.

Sementara itu, Komunitas Masyarakat turut berperan aktif dengan membangun komunikasi dan kerjasama antar kelompok serta menjalin jaringan dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi secara efektif. Mereka memfasilitasi ruang dialog dan silaturahmi yang intensif guna mengurangi kecemasan akibat informasi simpang siur terkait dampak pembangunan IKN. Komunitas juga berupaya melestarikan budaya lokal melalui pendirian Balai Adat Paser sebagai pusat kegiatan budaya dan pendidikan adat bagi masyarakat. Semua upaya ini bersama-sama diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah konflik sosial di kawasan strategis ini.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini mengenai upaya pencegahan konflik sosial di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, menunjukkan keselarasan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat individu, dan komunitas dalam membangun kerukunan dan mencegah konflik. Sama halnya dengan temuan penelitian oleh Sopaheluwakan (2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan aparat pemerintah sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial di daerah yang mengalami perubahan demografis signifikan. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil studi tersebut dengan

menambahkan dimensi literasi informasi sebagai faktor penting dalam menghadapi dinamika sosial di era digital, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berbeda dengan penelitian A (Misnadiarly, 2020) yang lebih menekankan pada peran aparat keamanan semata dalam pencegahan konflik, temuan penelitian ini menyoroti peran sentral masyarakat individu dan komunitas dalam menjaga kerukunan, khususnya melalui edukasi lintas budaya dan komunikasi efektif antar kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan konflik tidak hanya dapat diandalkan pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan yang bersifat sosial dan budaya. Temuan ini menolak asumsi sebelumnya yang cenderung melihat konflik hanya sebagai masalah keamanan, karena di Kecamatan Sepaku pencegahan konflik membutuhkan pendekatan yang lebih holistik.

Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi oleh Rahman dan Nurhayati (2019) mengenai pentingnya pelibatan tokoh adat dan agama dalam dialog lintas kelompok sebagai kunci menjaga kerukunan di daerah multietnis. Program 'Harmoni Sepaku' yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan bukti nyata keberhasilan dialog rutin yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mengelola perbedaan dan mengurangi potensi konflik. Temuan ini menguatkan pentingnya aspek budaya dan sosial dalam strategi pencegahan konflik yang komprehensif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi tambahan terhadap pemahaman pencegahan konflik sosial di kawasan yang sedang mengalami transformasi sosial dan pembangunan besar seperti IKN, dengan menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan multidimensi lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral yang hanya berfokus pada satu aspek saja.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai upaya pencegahan konflik sosial di Kecamatan Sepaku, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang sangat berperan dalam keberhasilan program-program kerukunan. Salah satu faktor pendukung utama adalah keberadaan tokoh adat dan agama yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat. Peran mereka sebagai mediator sosial dan fasilitator dialog lintas kelompok terbukti mampu meredam potensi konflik yang muncul akibat perbedaan budaya dan latar belakang sosial. Temuan ini sejalan dengan teori kepamongprajaan yang menekankan pentingnya pemangku adat dalam menjaga harmoni masyarakat tradisional (Sopaheluwakan, 2015).

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam pencegahan konflik. Salah satunya adalah adanya kesenjangan informasi dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu. Hal ini menyebabkan mudahnya penyebaran hoaks dan informasi yang menimbulkan kecemasan atau kesalahpahaman antar kelompok. Faktor ini menegaskan pentingnya program edukasi dan pelatihan literasi informasi sebagai bagian integral dari strategi pencegahan konflik, terutama di era kemajuan teknologi informasi saat ini.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Widodo (2019) yang menyoroti peran literasi digital dalam meredam konflik sosial.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya partisipasi aktif sebagian masyarakat pendatang menjadi kendala dalam membangun kerukunan yang menyeluruh. Banyak pendatang yang masih merasa kurang terlibat dalam kegiatan sosial dan dialog antar kelompok, yang dapat menimbulkan rasa terasing dan potensi konflik laten. Oleh karena itu, peningkatan ruang dialog dan kegiatan inklusif yang melibatkan semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan ini. Temuan ini menambah wawasan baru bahwa partisipasi sosial harus diperluas dan tidak hanya mengandalkan kelompok masyarakat asli saja.

Secara keseluruhan, temuan tambahan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika sosial di Kecamatan Sepaku, sekaligus menegaskan bahwa pencegahan konflik harus didukung oleh berbagai faktor dan perlu menghadapi berbagai tantangan yang ada dengan strategi yang adaptif dan partisipatif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi konflik sosial di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, terdapat beberapa penyebab utama yang berpotensi memicu konflik sosial di kawasan tersebut, meskipun hingga saat ini belum terjadi konflik besar. Faktor-faktor tersebut meliputi sengketa pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan kompensasi, perbedaan persepsi dan kepentingan, migrasi penduduk yang membawa keberagaman budaya, serta adanya ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial. Kedua, tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Sepaku sudah cukup baik dan sesuai dengan teori kesiapsiagaan Jan Sopaheluwakan dkk. Masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai potensi konflik sosial dan langkah antisipasi yang perlu diambil. Pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta memiliki mekanisme penyelesaian konflik dan mobilisasi sumber daya yang memadai. Komunitas masyarakat juga aktif berperan dalam deteksi dini dan penanganan konflik sebelum pembangunan IKN berjalan. Ketiga, upaya-upaya pencegahan konflik sosial sudah dilakukan secara terpadu oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat. Masyarakat menjaga toleransi dan menjalin hubungan harmonis dengan pendatang, pemerintah daerah menerbitkan kebijakan yang mencegah konflik, dan komunitas masyarakat memfasilitasi ruang dialog serta silaturahmi sebagai sarana penyampaian aspirasi dan penyelesaian masalah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran diajukan agar kesiapsiagaan menghadapi konflik sosial di kawasan IKN dapat semakin optimal. Pertama, individu, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat perlu mengembangkan protokol penanganan konflik yang cepat dan efektif, menjamin transparansi dalam proses valuasi tanah dan kompensasi, serta menyusun kebijakan migrasi yang terencana dan bertahap guna mengurangi guncangan sosial. Kedua, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap potensi konflik baru seiring kemajuan pembangunan IKN, pembuatan panduan

penanganan konflik yang mudah dipahami, serta pelatihan mediasi bagi tokoh masyarakat dan aparat. Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan kebijakan pemerintah daerah, dan peningkatan peran komunitas masyarakat harus terus dilakukan untuk memperkuat inisiatif yang sudah berjalan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang harmonis dan siap menghadapi dinamika sosial di kawasan IKN.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini antara lain terletak pada cakupan lokasi yang hanya fokus pada Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga hasil temuan mungkin kurang mewakili kondisi di wilayah lain di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, penelitian ini lebih mengandalkan data kualitatif dari wawancara dan observasi yang bersifat subjektif, sehingga potensi bias persepsi informan tidak dapat sepenuhnya dihindari. Waktu penelitian yang terbatas juga membatasi kedalaman analisis terhadap dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan proses pembangunan IKN. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau situasi sosial-politik yang cepat juga tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan dianalisis secara komprehensif dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, menggunakan metode yang lebih beragam, serta mengalokasikan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan gambaran kesiapsiagaan masyarakat yang lebih menyeluruh dan akurat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian dapat diarahkan pada pengembangan studi yang lebih komprehensif dengan memperluas cakupan wilayah penelitian ke daerah-daerah lain di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi konflik sosial. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif yang lebih mendalam dan campuran antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat memperkuat validitas data serta analisis. Penelitian selanjutnya juga dapat fokus pada evaluasi efektivitas program-program pencegahan konflik yang telah diterapkan oleh pemerintah dan komunitas, serta mengkaji dampak pembangunan IKN secara lebih rinci terhadap dinamika sosial masyarakat. Pengembangan model kesiapsiagaan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebijakan juga menjadi aspek penting untuk diteliti agar dapat memberikan rekomendasi strategis yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. S. (2017). KOMUNIKASI SEBAGAI PENYEBAB DAN SOLUSI KONFLIK SOSIAL. *Jurnal Common*, 1(2). <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.573>
- Dewi, A., Hidayat, R., Widhagdha, M. F., & Purwanto, W. (2020). DINAMIKA KOMUNIKASI DALAM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.33-38>
- Fernando, W. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYRAKAT ADAT IKN, DENGAN TINJAUAN TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT. *Mandalika Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1545>
- Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, A. P. U. (2022a). Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 8(1).
- Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, A. P. U. (2022b). Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 8(1).
- Heriyanti, K. (2022). INTERNALISASI KONSEP PLURALISME DI TENGAH KONFLIK SOSIAL (Perspektif Agama Hindu). *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 13(1). <https://doi.org/10.25078/sanjiwani.v13i1.1004>
- Khair, O. I., Sitohang, V., Setianingsih, S., & Usuma, G. W. K. (2023). PENERAPAN UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN KONFLIK LAHAN DI IBUKOTA NEGARA BARU. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3266>
- Konflik Sosial di DKI Jakarta, P., Hesty FMT, B., Andaya Lestari, A., Farid Wadjdi, A., Penginderaan Universitas Pertahanan, T., & Kemhan, B. (2022). Pemanfaatan Teknologi Big Data Analytics Untuk Mendukung Pertahanan Negara (Studi Kasus Prediksi Konflik Sosial Di Dki Jakarta). *Teknologi Penginderaan*, 3(2).
- Marwanti, T. M. (2018). KETAHANAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT KAMPUNG PULO DI KABUPATEN GARUT. *Pekerjaan Sosial*, 16(2). <https://doi.org/10.31595/peksos.v16i2.113>
- Purnomo, N. A., & Demartoto, A. (2023). Strategi Integrasi Nasional Berbasis Plularitas Dan Multikulturalisme Dalam Menjaga Harmoni Sosial di Ibu Kota Negara Nusantara. *Prosiding Konferensi Nasional*
- Ratib, V. A. (2022). Rekayasa Sosial Melalui Peraturan Perundang-undnaganuntuk Mencegah Konflik dalam Pembangunan Ibu Kota Negara. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*.
- Saputra, A., Liyana, C. E., Sempena, I. D., Mursyidin, & Baihaqi. (2023). Kerentanan Konflik Sosial Di Kawasan Ibu Kota Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1.
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. *Jurnal Academia Praja*, 5(1). <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.889>
- Sutanto, H. P. (2022). Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.43-56>

Syamsuddin, A. (2020). KONFLIK SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(1). <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.865>

